

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi pesat di kawasan Asia telah menciptakan kebutuhan mendesak akan pembangunan infrastruktur modern. Kesenjangan infrastruktur ini diperkirakan memerlukan investasi hingga USD 26 triliun pada tahun 2030 (ADB, 2017). Untuk menjawab tantangan ini, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) hadir sebagai solusi. Lembaga keuangan multilateral yang didirikan pada tahun 2015 atas inisiatif Tiongkok ini menampilkan pendekatan yang berbeda dibandingkan lembaga tradisional seperti *World Bank* dan IMF, yang sering dianggap terlalu terikat dengan agenda politik negara-negara Barat. AIIB menonjolkan pendekatan fleksibel dan inklusif, dengan fokus pada mendukung pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) memainkan peran sentral dalam memperkuat posisi Tiongkok sebagai aktor utama dalam pengembangan infrastruktur global yang secara efektif menggabungkan kepentingan ekonomi dengan strategi diplomasi (Wilson, 2017). Melalui AIIB Tiongkok berusaha tidak hanya memperkuat hubungan ekonomi, tetapi juga memperluas pengaruh politiknya di kawasan, menjadikan AIIB sebagai alat diplomasi ekonomi yang sangat efektif (Liao, 2018).

AIIB adalah bagian integral dari Belt and Road Initiative (BRI), proyek ambisius yang diluncurkan oleh Tiongkok pada tahun 2013 untuk meningkatkan

konektivitas dan kerja sama antarnegara di Asia, Eropa, dan Afrika melalui investasi besar-besaran dalam infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi (Liao, 2018). BRI bertujuan untuk menciptakan jalur perdagangan dan investasi yang menghubungkan Tiongkok dengan dunia, dimana AIIB berfungsi sebagai salah satu instrumen utama pendanaannya. Korelasi antara AIIB dan BRI mencerminkan sinergi dalam strategi Tiongkok untuk memperkuat pengaruhnya di tingkat global melalui kerja sama multilateral. Dengan dukungan dari lebih dari 100 negara anggota, AIIB telah memperluas jangkauan BRI dan memperdalam pengaruh Tiongkok di berbagai negara berkembang (Xu, 2019).

Kehadiran AIIB merupakan bagian dari upaya strategis Tiongkok untuk memperkuat citra positifnya di kawasan regional dan internasional. Konsep ini erat kaitannya dengan strategi *soft power*, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Joseph Nye, yang menggambarkan kemampuan negara untuk mempengaruhi aktor internasional lainnya melalui daya tarik nilai-nilai budaya, kebijakan luar negeri, dan praktik-praktik politik yang meyakinkan tanpa paksaan militer atau ekonomi (Nye, 2004). Dalam konteks AIIB, *soft power* Tiongkok tercermin melalui pendekatan yang menekankan pada kemitraan yang saling menguntungkan, ketentuan pembiayaan yang lebih fleksibel, serta komitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang melalui investasi infrastruktur. Pendekatan ini memungkinkan Tiongkok untuk membangun persepsi sebagai mitra yang dapat diandalkan dan kompeten dalam mendukung pembangunan di negara-negara berkembang, memperkuat citra positifnya di mata negara-negara tersebut (Smith, 2020).

AIIB masuk ke Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu pilar utama kebijakan ekonomi nasional. Ditengah terbatasnya anggaran domestik dan tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur, pemerintah Indonesia melihat AIIB sebagai mitra strategis yang dapat membantu mewujudkan visi pembangunan tersebut. Aktor-aktor utama dibalik kerjasama ini adalah Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang secara aktif menjalin komunikasi dengan AIIB untuk memperoleh pendanaan bagi proyek-proyek infrastruktur prioritas, seperti jalan tol Trans-Sumatra dan pembangunan pembangkit listrik (Wilson, 2017). Pada masa ini, kerja sama dengan AIIB selaras dengan agenda pembangunan nasional Indonesia yang membutuhkan sumber daya finansial eksternal untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

Indonesia adalah salah satu negara yang memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Tiongkok. Keuntungan bagi Tiongkok dalam keterlibatan AIIB di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya tidak hanya terbatas pada pembentukan citra positif sebagai mitra pembangunan. Secara ekonomi, keterlibatan AIIB membuka peluang besar bagi perusahaan-perusahaan di Tiongkok untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek infrastruktur yang didanai oleh AIIB. Hal ini memberikan dampak langsung terhadap perekonomian Tiongkok, terutama melalui peningkatan kontrak konstruksi dan teknologi yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan nasionalnya (Liao, 2018). Selain itu, proyek-proyek ini seringkali melibatkan tenaga kerja Tiongkok, yang memperluas pasar tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan nasional. Pada level finansial, AIIB juga

memberikan keuntungan bagi Tiongkok dalam bentuk peningkatan akses ke sumber daya dan pasar baru, yang pada gilirannya memperkuat hubungan ekonomi bilateral.

Dari perspektif hubungan luar negeri, keterlibatan AIIB dalam proyek-proyek infrastruktur strategis di Indonesia berkontribusi pada perluasan pengaruh diplomatik Tiongkok. Pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan dan jalan tol, meningkatkan konektivitas antara negara-negara berkembang dan Tiongkok, memperkuat posisi Tiongkok sebagai pusat perdagangan dan investasi di kawasan. Selain itu, keterlibatan dalam AIIB membantu Tiongkok mencapai tujuan kebijakan luar negerinya, yaitu menciptakan tatanan internasional yang lebih multipolar, dimana Tiongkok berperan sebagai salah satu aktor utama dalam menentukan norma dan aturan global (Tan, 2019).

Khusus di Indonesia, AIIB telah menunjukkan keberhasilan signifikan dalam mendukung proyek-proyek infrastruktur nasional. Sejak 2016, AIIB telah berinvestasi secara signifikan di Indonesia, membiayai berbagai proyek infrastruktur strategis yang tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok. Misalnya, investasi AIIB di sektor pembiayaan infrastruktur telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui pembiayaan proyek perbaikan wilayah kumuh di area urban dan pengembangan Mandalika Urban sebagai destinasi wisata berkelanjutan (AIIB, 2018). Di tahun 2018 AIIB bahkan membiayai infrastruktur untuk meningkatkan sektor pariwisata di Indonesia yakni Sirkuit Mandalika. Di sisi lain, investasi ini juga membantu Tiongkok dalam membangun citra positif sebagai

negara yang berperan aktif dalam pembangunan internasional, meningkatkan daya tarik *soft power* di kawasan Asia Tenggara (Xu, 2019).

Keberhasilan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dalam membiayai proyek infrastruktur di Indonesia telah memainkan peran signifikan dalam memperkuat citra Tiongkok sebagai mitra pembangunan yang andal dan kompeten di kancah internasional. Kesuksesan berbagai proyek yang didanai oleh AIIB di Indonesia tidak hanya memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi negara tersebut, tetapi juga memperkuat persepsi bahwa Tiongkok mampu memimpin inisiatif pembangunan di negara berkembang dengan pendekatan yang efektif. Proyek-proyek ini menjadi bukti nyata dari kemampuan AIIB dalam menyediakan solusi finansial yang fleksibel untuk mendukung pembangunan infrastruktur, yang pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Selain itu, keterlibatan AIIB dalam berbagai proyek infrastruktur di Indonesia juga mencerminkan kemampuan Tiongkok untuk memanfaatkan diplomasi ekonomi sebagai instrumen strategis dalam memperluas pengaruhnya di kawasan Asia (Smith, 2020). AIIB berhasil menunjukkan bahwa pendekatan multilateral yang diusungnya mampu menawarkan model alternatif yang efektif dalam kerjasama pembangunan internasional, khususnya di kawasan Asia. Tidak seperti institusi keuangan multilateral tradisional seperti *World Bank* atau *Asian Development Bank* (ADB), AIIB menekankan pada fleksibilitas pendanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik negara-negara penerima.

AIIB telah menunjukkan peran pentingnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan pembiayaan proyek-proyek

strategis yang memiliki dampak langsung terhadap pengentasan kemiskinan dan pengembangan kawasan urban. Salah satu proyek utama adalah perbaikan wilayah kumuh urban, yang mencakup rehabilitasi lingkungan, pembangunan fasilitas sanitasi, serta penyediaan akses air bersih di berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Pada tahun 2018, AIIB menyetujui pendanaan sebesar USD 216,5 juta untuk mendukung program ini, yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi kehidupan lebih dari 1,5 juta penduduk di kawasan kumuh perkotaan (AIIB, 2018). Proyek ini mencakup renovasi lebih dari 3.000 rumah, pemasangan 150 kilometer jaringan pipa air bersih, dan pembangunan 250 fasilitas umum, seperti taman kota dan pusat komunitas, yang diharapkan dapat mendorong partisipasi sosial dan memperkuat hubungan komunitas lokal.

Selain itu, proyek perbaikan bendungan yang didanai AIIB telah berhasil memperkuat infrastruktur pengelolaan air di Indonesia, termasuk rehabilitasi Bendungan Karian di Banten dan Bendungan Jatigede di Jawa Barat. Total pendanaan sebesar USD 150 juta dialokasikan pada tahun 2019 untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan air hingga 650 juta meter kubik (AIIB, 2019). Proyek ini bertujuan mengurangi risiko banjir tahunan yang memengaruhi lebih dari 500.000 penduduk di wilayah rawan banjir sekaligus meningkatkan kapasitas irigasi bagi sekitar 100.000 hektar lahan pertanian. Selain itu, proyek ini mendukung pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan dengan menerapkan teknologi pemantauan modern untuk mengontrol distribusi air dan memperbaiki efisiensi penggunaannya.

Salah satu proyek unggulan lainnya adalah Mandalika Urban and Tourism Infrastructure Development yang didanai AIIB dengan alokasi sebesar USD 248,4 juta pada tahun 2018 (AIIB, 2018). Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan Mandalika di Lombok menjadi destinasi wisata kelas dunia yang ramah lingkungan, melibatkan pembangunan jalan raya sepanjang 17 kilometer, pemasangan sistem drainase modern untuk mencegah banjir, serta pembangunan fasilitas pendukung pariwisata seperti pusat informasi, area parkir, dan jalur pedestrian. Dengan pengembangan ini, Mandalika diharapkan dapat menarik 2 juta wisatawan setiap tahun, menciptakan lebih dari 15.000 lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan domestik bruto lokal hingga 30% dalam lima tahun pertama implementasi proyek (Liu & Garcia-Herrero, 2020).

Ketiga proyek ini tidak hanya memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia, tetapi juga memperkuat citra AIIB sebagai mitra pembangunan yang terpercaya dan fleksibel, selaras dengan agenda global seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan *Paris Agreement*, yang menekankan pada pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan melalui inovasi infrastruktur (UNFCCC, 2015).

Urgensi penelitian ini terletak pada pemahaman mendalam tentang peran AIIB sebagai instrumen *soft power* Tiongkok dalam memperkuat pengaruhnya di kawasan Asia dan di tingkat global. Penelitian ini fokus terhadap dampak AIIB di Indonesia, sebuah negara yang memainkan peran kunci dalam dinamika geopolitik kawasan Asia Tenggara. Dalam era dimana kekuatan negara tidak lagi hanya diukur melalui kekuatan militer atau ekonomi semata, tetapi juga melalui kemampuan

membentuk persepsi dan norma global, AIIB muncul sebagai salah satu instrumen paling signifikan dalam diplomasi ekonomi Tiongkok. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi kajian hubungan internasional dengan menyoroti bagaimana strategi *soft power* dapat diimplementasikan melalui inisiatif pembangunan infrastruktur multilateral.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pembangunan infrastruktur di Indonesia yang didanai oleh *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) mempengaruhi persepsi masyarakat Indonesia terhadap Tiongkok?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengidentifikasi strategi *soft power* Tiongkok melalui AIIB memengaruhi pembangunan infrastruktur di Indonesia pada periode 2016–2018, dengan menekankan pola pendekatan Tiongkok dalam membangun hubungan ekonomi, diplomasi, dan geopolitik. Mencakup bagaimana Tiongkok menggunakan AIIB untuk mendanai proyek infrastruktur strategis, mempromosikan kerja sama bilateral, meningkatkan daya tarik ekonomi, serta memperluas pengaruh politiknya di Indonesia secara terstruktur dan berkelanjutan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Mengidentifikasi secara mendalam pengaruh strategi *soft power* Tiongkok melalui *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) terhadap pengembangan

sektor infrastruktur strategis di Indonesia, dengan menganalisis berbagai kebijakan, proyek, dan dampak konkret yang dihasilkan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai strategi *soft power* dalam konteks hubungan internasional dan menambah pemahaman tentang peran lembaga keuangan internasional baru seperti AIIB dalam dinamika geopolitik. Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan teori *soft power* dengan menunjukkan bagaimana lembaga internasional dapat digunakan sebagai alat politik dalam diplomasi modern.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan di Indonesia dalam merumuskan strategi kerja sama internasional yang lebih berimbang dan terinformasi, serta memberikan wawasan bagi lembaga akademik, peneliti, dan praktisi mengenai dampak investasi AIIB dalam konteks *soft power* Tiongkok. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi para pembuat kebijakan untuk memahami potensi manfaat dan risiko dari ketergantungan pada sumber pembiayaan internasional yang dipengaruhi oleh kepentingan politik negara donor.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoretis

1.5.1 State of The Art

Tinjauan pustaka yang pertama dikutip dari jurnal berjudul *Explaining China's Creation of the Asian Infrastructure Investment Bank* yang ditulis oleh Zheng Chen dan Yanchuan Liu pada tahun 2020, membahas tentang pembentukan AIIB sebagai upaya Tiongkok untuk mereformasi tata kelola keuangan global. Penelitian ini menyoroti bahwa AIIB tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan investasi infrastruktur di Asia, tetapi juga berfungsi sebagai alat bagi Tiongkok untuk menunjukkan niat baik dan komitmennya terhadap kerjasama internasional. Chen dan Liu mengemukakan bahwa AIIB merupakan bagian dari strategi Tiongkok untuk memperkuat pengaruhnya di arena internasional sambil memberikan sinyal tentang kapasitas dan tekadnya untuk mengatasi ketidakpuasan terhadap lembaga-lembaga keuangan Barat. Meskipun artikel ini memberikan wawasan yang mendalam tentang konteks global AIIB, namun tidak secara spesifik membahas dampak dari AIIB terhadap persepsi publik di Indonesia, sehingga relevansi langsungnya terhadap studi kasus ini terbatas.

Selanjutnya, jurnal berjudul *China's AIIB in Southeast Asia: Economic Impacts and Political Implications* yang ditulis oleh Rebecca Smith (2020) menyoroti peran AIIB sebagai jembatan penghubung yang mampu mengurangi hambatan politik dalam investasi lintas negara. Analisis ini memperkuat argumen bahwa AIIB tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ekonomi, tetapi juga mempererat hubungan bilateral melalui diplomasi ekonomi. Penelitian ini mengidentifikasi bagaimana AIIB membantu memperkuat hubungan ekonomi

antara Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Namun, meskipun analisis ini memberikan pemahaman yang kuat mengenai dampak ekonomi dari proyek-proyek AIIB, ia kurang menggali aspek sosial-politik serta dampaknya terhadap persepsi publik di Indonesia, menjadikannya kurang komprehensif dalam konteks penelitian ini.

Tinjauan pustaka yang ketiga, jurnal berjudul *Multilateralism and Soft power Made-in-China: (re)Adjusting Role Conception* oleh Zheng Chen dan Yanchuan Liu (2023), mengkaji bagaimana Tiongkok menggunakan kombinasi *soft power* dan multilateralism untuk memperkuat posisinya di panggung global. Artikel ini mencatat bahwa pendekatan multilateral Tiongkok, termasuk melalui AIIB, bertujuan untuk membangun citra positif dan mengurangi persepsi negatif terhadap negara tersebut. Penelitian ini juga menekankan pentingnya institusi baru seperti AIIB dalam membantu Tiongkok mencapai tujuan diplomatiknya. Meskipun artikel ini memberikan wawasan tentang strategi *soft power* Tiongkok secara umum, tidak secara khusus membahas dampak dari AIIB terhadap infrastruktur dan persepsi publik di Indonesia.

Tinjauan pustaka yang keempat, jurnal berjudul *Kontribusi Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Indonesia* oleh Jovanka pada tahun 2021, menyelidiki bagaimana AIIB berperan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa AIIB menjadi alternatif sumber pendanaan bagi proyek-proyek infrastruktur besar di Indonesia. Jovanka menjelaskan bahwa meskipun kehadiran AIIB membawa peluang bagi pembangunan ekonomi, tantangan seperti beban utang dan resistensi

lokal tetap ada. Jurnal ini sangat relevan karena memberikan analisis langsung tentang dampak AIIB di Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Meskipun jurnal ini meneliti mengenai peran AIIB dalam pembangunan infrastruktur, namun jurnal tersebut tidak membahas secara mendalam mengenai *soft power* Tiongkok melalui AIIB.

Tinjauan pustaka yang kelima, jurnal berjudul Dampak Investasi Infrastruktur Tiongkok di Indonesia: Perspektif Ekonomi dan Politik oleh Budi Kurniawan (2019), meneliti dampak investasi infrastruktur Tiongkok terhadap ekonomi lokal dan hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok. Kurniawan menekankan bahwa meskipun proyek-proyek seperti kereta cepat Jakarta-Bandung memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi, terdapat tantangan dalam hal resistensi lokal dan kekhawatiran akan pengaruh politik Tiongkok yang semakin besar. Penelitian ini relevan karena menggabungkan perspektif ekonomi dan politik, namun masih kurang dalam eksplorasi dampak jangka panjang terhadap persepsi publik mengenai Tiongkok dan AIIB di Indonesia.

Perbandingan dengan penelitian sebelumnya menunjukkan adanya kesamaan dan perbedaan dalam fokus serta pendekatan teoritis yang digunakan. Sebagian besar penelitian sebelumnya menekankan pada dimensi ekonomi dari proyek-proyek infrastruktur yang didanai oleh AIIB, seperti yang terlihat pada karya Smith dan Kurniawan. Namun, penelitian ini lebih mendalami aspek *soft power* Tiongkok melalui AIIB dengan fokus pada bagaimana proyek proyek tersebut telah berhasil dilaksanakan sehingga mempengaruhi persepsi publik di Indonesia. Sementara Chen dan Liu serta Jovanka menggunakan pendekatan

analisis kebijakan internasional dan lokal, penelitian ini menerapkan teori *soft power* untuk mengeksplorasi bagaimana citra Tiongkok dibentuk melalui keterlibatan infrastrukturnya di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai interaksi antara investasi infrastruktur Tiongkok dan pengaruhnya terhadap hubungan sosial-politik di Indonesia.

1.5.2 Teori Neoliberalisme Institusional

Teori yang menjadi dasar penelitian ini adalah neoliberalisme institusional, sebuah paradigma dalam hubungan internasional yang berfokus pada bagaimana negara-negara dapat bekerja sama secara efektif dalam tatanan internasional yang anarkis. Neoliberalisme institusional berkembang sebagai reaksi terhadap teori realisme, yang melihat dunia internasional sebagai tempat dimana kekuatan militer dan nasionalisme mendominasi perilaku negara-negara (Keohane & Nye, 1977). Robert Keohane dalam *After Hegemony* (1984) menjelaskan bahwa meskipun tidak ada otoritas sentral yang mengatur hubungan antarnegara, kerjasama tetap mungkin terjadi melalui lembaga internasional yang memfasilitasi interaksi dan membantu negara-negara mengatasi dilema ketidakpercayaan.

Salah satu gagasan pokok dalam neoliberalisme institusional adalah bahwa institusi internasional dapat mengurangi ketidakpastian dan ketidakstabilan dengan menciptakan aturan, norma, dan prosedur yang disepakati bersama. Institusi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *World Trade Organization* (WTO), dan bank pembangunan multilateral seperti *World Bank* atau *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) berfungsi untuk mempromosikan keteraturan dan stabilitas dalam

hubungan internasional. Keberadaan aturan-aturan ini membantu negara-negara mengurangi biaya transaksi dan meminimalisasi resiko dari tindakan unilateral yang dapat memicu konflik (Keohane, 1984). Dalam konteks ini, Tiongkok menggunakan AIIB sebagai platform untuk memperkuat posisi geopolitiknya dengan mendorong kerjasama infrastruktur, terutama di Asia Tenggara.

Keohane dan Nye (2001) juga memperkenalkan konsep interdependensi kompleks dalam *Power and Interdependence*, yang menggambarkan bagaimana negara-negara saat ini semakin saling terhubung melalui berbagai jaringan ekonomi, politik, dan sosial. Hubungan yang dihasilkan oleh interdependensi ini tidak lagi didominasi oleh isu-isu keamanan, tetapi oleh tantangan bersama seperti ekonomi global, perubahan iklim, dan pembangunan infrastruktur. Dalam interdependensi kompleks, institusi internasional memainkan peran penting untuk memfasilitasi kerjasama antarnegara dengan menyediakan ruang untuk dialog dan mengurangi insentif bagi perilaku koersif atau konflik terbuka (Keohane & Nye, 2001).

Institusi internasional dalam pandangan neoliberalisme institusional bukan sekadar alat bagi negara-negara kuat untuk mendikte kebijakan internasional, melainkan platform untuk membangun konsensus yang lebih luas dan menciptakan keuntungan bersama. Negara-negara menggunakan institusi ini untuk mencapai tujuan-tujuan nasional mereka dengan cara yang lebih efektif dan efisien, sekaligus mengurangi potensi konflik yang dapat merusak hubungan bilateral atau regional. AIIB sebagai salah satu contoh nyata dari institusi internasional yang didirikan oleh Tiongkok, berperan penting dalam mempromosikan kepentingan Tiongkok di Asia

Tenggara. Namun dalam kerangka neoliberalisme institusional, AIIB juga berfungsi sebagai instrumen yang memungkinkan negara-negara anggota seperti Indonesia untuk mendapatkan manfaat langsung dari kerjasama infrastruktur yang didanai oleh Tiongkok.

Institusi seperti AIIB juga berfungsi sebagai rezim internasional, yang menurut Keohane (1984) adalah sekumpulan aturan, norma, dan keputusan yang berfungsi untuk mengatur perilaku aktor di dalam suatu sistem internasional. AIIB menciptakan rezim baru yang mendukung proyek infrastruktur di negara-negara berkembang, dengan penekanan pada pendekatan inklusif yang berbeda dari institusi Barat seperti IMF dan *World Bank*. Pendanaan yang lebih fleksibel, serta minimnya kondisi politik yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam lembaga-lembaga Barat, menjadikan AIIB sebagai alternatif yang menarik (Ferdinand, 2016).

Joseph Nye, seorang pemikir terkemuka dalam hubungan internasional, memperkenalkan konsep *soft power* dalam bukunya *Soft Power: The Means to Success in World Politics* (2004), yang menjadi elemen kunci dalam pemikiran ini. Nye menjelaskan bahwa kekuatan tidak hanya diproyeksikan melalui kekuatan militer atau paksaan, tetapi juga melalui daya tarik budaya, nilai-nilai politik, dan kebijakan luar negeri yang persuasif. Dalam konteks neoliberalisme institusional, *soft power* merupakan instrumen yang dapat digunakan melalui institusi internasional untuk mempengaruhi perilaku negara lain tanpa paksaan langsung. AIIB adalah manifestasi dari *soft power* Tiongkok, dimana Tiongkok mengajak negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk terlibat dalam proyek-proyek

pembangunan yang didanai oleh AIIB, yang dalam jangka panjang memperkuat pengaruh politik dan ekonomi Tiongkok di kawasan tersebut.

Menurut Nye (2004), *soft power* lebih efektif jika didukung oleh institusi internasional yang kuat, karena institusi ini memberikan legitimasi bagi tindakan negara. Dengan AIIB, Tiongkok tidak hanya berusaha memperluas pengaruh ekonominya, tetapi juga membangun citra positif sebagai pemimpin yang berkomitmen untuk pembangunan global. Penggunaan AIIB sebagai instrumen *soft power* Tiongkok di Asia Tenggara menunjukkan bagaimana interdependensi ekonomi yang difasilitasi oleh institusi ini menciptakan pengaruh politik tanpa harus menggunakan pendekatan koersif.

Relevansi teori neoliberalisme institusional dalam penelitian ini terletak pada bagaimana AIIB berfungsi sebagai alat utama dalam mempromosikan kerjasama ekonomi antara Tiongkok dan Indonesia. Melalui AIIB, Tiongkok memanfaatkan platform internasional untuk meningkatkan *soft power*, memperkuat ikatan ekonomi antara kedua negara, dan memperluas pengaruh politiknya di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama infrastruktur yang difasilitasi oleh AIIB menciptakan saling ketergantungan antara Tiongkok dan Indonesia, dimana Indonesia mendapatkan manfaat ekonomi, sementara Tiongkok mendapatkan keuntungan politik yang lebih besar dalam hubungan bilateralnya. Dengan demikian, AIIB berfungsi tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai alat strategis dalam kebijakan luar negeri Tiongkok, sesuai dengan prinsip-prinsip neoliberalisme institusional.

1.6 Argumen Penelitian

Keberhasilan Tiongkok dalam mendukung proyek infrastruktur di Indonesia, yang disalurkan melalui pendanaan AIIB, telah menjadi salah satu faktor utama dalam pembentukan citra positif Tiongkok sebagai mitra pembangunan global. Proyek-proyek ini tidak hanya berhasil meningkatkan kualitas infrastruktur di Indonesia, tetapi juga menunjukkan efektivitas pendekatan multilateral yang diterapkan oleh AIIB dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Dengan pencapaian tersebut, Tiongkok semakin memperkuat posisinya di panggung internasional sebagai negara yang mampu berkontribusi pada pembangunan negara-negara berkembang secara signifikan, sekaligus memperluas pengaruh geopolitiknya di Asia Tenggara. Melalui AIIB, Tiongkok berhasil memperkuat citra positifnya sebagai mitra pembangunan yang andal dan efisien, yang di samping mendorong pembangunan infrastruktur, juga berfungsi sebagai alat *soft power*. AIIB tidak hanya membantu mempercepat pembangunan infrastruktur Indonesia, tetapi juga memperkuat keuntungan ekonomi dan keterikatan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok, yang pada akhirnya meningkatkan pengaruh politik dan ekonomi Tiongkok di Indonesia (Wilson, 2017).

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan konsep kunci dalam hubungan internasional yang merujuk pada tujuan utama suatu negara dalam menjaga dan memajukan keamanan, kesejahteraan, serta stabilitas internal dan eksternal. Kepentingan nasional meliputi berbagai dimensi seperti keamanan, ekonomi, dan

politik, yang masing-masing dapat mencerminkan prioritas domestik maupun internasional suatu negara. Dalam konteks teori neoliberalisme institusional, kepentingan nasional juga dipahami sebagai dorongan suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas melalui kerja sama internasional dan partisipasi dalam lembaga multilateral (Keohane & Nye, 2001). Berbeda dengan perspektif realis yang menekankan ancaman dan kompetisi, neoliberalisme institusional melihat kepentingan nasional sebagai sesuatu yang dapat dicapai melalui kolaborasi dan interaksi positif dengan aktor-aktor global lainnya.

Dalam neoliberalisme institusional, kepentingan nasional tidak hanya dilihat sebagai sekadar kekuatan militer atau ancaman eksternal, tetapi juga mencakup aspek ekonomi dan kesejahteraan kolektif yang dapat diraih melalui kerja sama multilateral. Lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *World Trade Organization* (WTO), menjadi arena bagi negara-negara untuk mengejar kepentingan nasional mereka tanpa harus mengorbankan stabilitas internasional. Melalui kerja sama ini, negara-negara dapat mencapai keamanan kolektif, menyelesaikan konflik ekonomi, dan memperkuat jaringan diplomasi yang lebih harmonis (Liao, 2018). Dalam konteks ini, kepentingan nasional tidak lagi eksklusif pada tindakan sepihak, tetapi juga melalui kolaborasi internasional yang menguntungkan berbagai pihak (Chin, 2019).

1.7.2 Definisi Operasional

1.7.2.1 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional dioperasionalisasikan dalam penelitian ini sebagai tujuan utama yang ingin dicapai Tiongkok melalui pengembangan infrastruktur di

Indonesia dengan memanfaatkan AIIB sebagai platform untuk memperluas pengaruh ekonominya. Dalam konteks ini, kepentingan nasional Tiongkok dilihat dari perspektif strategis dimana investasi besar di sektor infrastruktur Indonesia bertujuan memperkuat hubungan ekonomi bilateral dan menciptakan keuntungan ekonomi yang lebih dalam antara kedua negara (Wilson, 2017).

Kepentingan nasional Tiongkok dalam membentuk AIIB tidak dapat dipisahkan dari agenda geopolitiknya, yang bertujuan menciptakan zona pengaruh di Asia Tenggara melalui jaringan infrastruktur yang didanai oleh AIIB (Burchill, 2005). Kepentingan utama Tiongkok dalam membentuk AIIB dapat dilihat dari aspek ekonomi. Salah satu alasan mendasar adalah kebutuhan Tiongkok untuk mengeksport surplus modal dan meningkatkan permintaan global atas produk-produk industrinya. Sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia, Tiongkok memiliki kepentingan untuk memperluas pasarnya, terutama ke negara-negara berkembang yang membutuhkan infrastruktur. Melalui AIIB, Tiongkok dapat memberikan pinjaman kepada negara-negara ini, sambil memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur tersebut menggunakan produk dan teknologi dari perusahaan-perusahaan Tiongkok (Kaloko, 2021). Dengan demikian, AIIB tidak hanya menjadi instrumen *soft power*, tetapi juga menjadi saluran bagi ekspansi ekonomi Tiongkok di Asia.

Selain aspek ekonomi, kepentingan geopolitik juga menjadi faktor penting dalam pembentukan AIIB. Tiongkok berupaya memperkuat posisinya di kawasan Asia Tenggara melalui peningkatan keterlibatan ekonomi. AIIB menyediakan

platform bagi Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya di kawasan yang strategis ini, yang merupakan jalur penting dalam perdagangan internasional. Dengan melibatkan negara-negara Asia Tenggara dalam proyek-proyek infrastruktur, Tiongkok mampu meningkatkan ketergantungan negara-negara ini pada dana dan teknologi dari Tiongkok, yang pada gilirannya memperkuat posisi geopolitik Tiongkok di kawasan tersebut (Nye, 2004).

Untuk mengukur sejauh mana kepentingan nasional Tiongkok terealisasi melalui proyek AIIB di Indonesia, indikator yang digunakan meliputi nilai total investasi yang digelontorkan, sektor-sektor yang diprioritaskan, serta dampaknya terhadap posisi geopolitik Tiongkok di kawasan Asia Tenggara. Melalui AIIB, Tiongkok berusaha memperkuat pengaruhnya di Indonesia dengan mendanai proyek-proyek strategis seperti pembangunan jalan, pelabuhan, dan fasilitas energi, yang semuanya merupakan kunci dalam meningkatkan konektivitas regional dan mendorong integrasi ekonomi yang lebih kuat antara Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada analisis data terkait strategi *soft power* Tiongkok melalui AIIB dalam konteks pengembangan infrastruktur di Indonesia. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci fenomena hubungan bilateral dan pengaruh *soft power* Tiongkok melalui proyek-proyek infrastruktur yang didanai AIIB di Indonesia. Pendekatan kualitatif relevan karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji konteks sosial-politik dan ekonomi dari

kebijakan luar negeri Tiongkok, serta bagaimana kebijakan tersebut diterima oleh publik dan pemerintah Indonesia.

Penelitian ini bertumpu pada data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, publikasi lembaga internasional, serta artikel media massa yang kredibel. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), dimana sumber-sumber tersebut diolah untuk memberikan wawasan yang mendalam terkait peran AIIB dan strategi *soft power* Tiongkok. Data yang digunakan mencakup periode antara tahun 2016 hingga 2018, dimana AIIB memulai investasi besar-besaran di sektor infrastruktur Indonesia.

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan memaparkan secara sistematis dan mendalam fenomena strategi *soft power* Tiongkok melalui AIIB dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia pada periode 2016–2018. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka pada jurnal, buku, dan laporan lembaga internasional, kemudian dianalisis dengan teknik *content analysis* untuk menggambarkan pola kebijakan, mekanisme pembiayaan, serta persepsi aktor terkait (Morse & Richards, 2002). Dalam konteks ini, penelitian ini berfokus pada hubungan-hubungan yang terkait dengan peran AIIB dalam membantu Tiongkok mewujudkan kepentingan nasionalnya di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian dalam penelitian ini mencakup dua wilayah utama, yaitu Tiongkok dan Indonesia. Penelitian ini berfokus pada aktivitas Tiongkok sebagai inisiator Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) serta peran AIIB dalam mendanai proyek infrastruktur strategis di Indonesia. Aspek ruang penelitian meliputi pusat-pusat pengambilan kebijakan di Tiongkok serta situs proyek infrastruktur yang dibiayai AIIB di Indonesia.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) sebagai instrumen *soft power* Tiongkok yang mendanai proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia.

1.8.4 Jenis Data

Menurut Neuman (2002), dalam penelitian kualitatif, berbagai jenis data dapat digunakan, termasuk teks yang meliputi dokumen-dokumen, hasil wawancara, hasil observasi, artefak, audio, gambar, dan foto. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan data dalam bentuk dokumen dan teks tertulis.

1.8.5 Sumber Data

Umumnya terdapat dua sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian yakni data primer dan sekunder. Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel pada media massa. Data sekunder sendiri merupakan data yang didapat tidak langsung dari tangan pertama, mencakup

analisis laporan tahunan AIIB, serta studi kasus terkait proyek infrastruktur di Indonesia. Sumber-sumber data diakses melalui platform seperti JSTOR, SCOPUS, dan ScienceDirect untuk memastikan kredibilitas dan akurasi informasi yang digunakan.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan metode pengumpulan data yang dikenal sebagai *desk research* atau studi kepustakaan, yang melibatkan dua teknik yaitu *library research* dan *internet research*. Library research dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang tersedia di perpustakaan. Sementara itu, internet research dilakukan dengan mencari data melalui internet lalu setelahnya melakukan tahap penyaringan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode analisis data yang dikenal sebagai metode kongruen. Metode kongruen sering digunakan dalam penelitian untuk memastikan kesesuaian antara masalah penelitian dan pertanyaan penelitian, antara pertanyaan penelitian dan metode yang digunakan, serta antara metode, data, dan pengolahan data (Morse & Richards, 2002). Metode kongruen digunakan untuk melakukan analisis dengan mengeksplorasi hubungan sebab-akibat dan menguji kebenaran prediksi yang dihasilkan oleh konsep yang digunakan penulis.

1.8.8 Kualitas Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kualitas yang baik dan diperoleh dari sumber-sumber terpercaya yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini didukung oleh penggunaan berbagai sumber yang dianggap kredibel, termasuk media massa terpercaya, jurnal-jurnal akademik, buku-buku yang dianggap memiliki otoritas, serta situs-situs internet yang memiliki reputasi yang dapat dipertanggungjawabkan.